



EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA (Antara Penghematan Dan Optimalisasi Kinerja)

Robert Cenedy, Fauzan Zakir, Firdaus

STKIP Widiaswara Indonesia, UNU Sumbar

Corresponding Author: robertcenedy83@gmail.com.

Abstrak

Efisiensi anggaran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara penghematan anggaran dan optimalisasi kinerja birokrasi. Artikel ini menganalisis kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia dengan pendekatan normatif dan empiris, mencakup regulasi terkait, implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan efisiensi sering kali berorientasi pada pemotongan anggaran, pendekatan yang lebih strategis melalui digitalisasi, reformasi birokrasi, dan peningkatan transparansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Penghematan, Optimalisasi Kinerja, Pengelolaan Keuangan Negara, Reformasi Birokrasi.

PENDAHULUAN

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara menjadi perhatian utama bagi banyak pemerintahan, termasuk Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan nasional, pemerintah dituntut untuk menggunakan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Efisiensi anggaran tidak sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018: 45).

Dalam konteks kebijakan fiskal, efisiensi anggaran mencerminkan upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara optimal untuk mendukung program prioritas nasional. Efisiensi ini dapat dicapai melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta reformasi birokrasi guna mengurangi pemborosan dan kebocoran anggaran (Basri & Patunru, 2020: 67). Namun, pelaksanaan efisiensi anggaran sering kali mengalami tantangan, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Dalam praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran sering kali diartikan secara sempit sebagai pemotongan anggaran belaka. Padahal, jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang, pemangkasan anggaran justru dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat

pencapaian tujuan pembangunan. Misalnya, dalam sektor pendidikan dan kesehatan, pemotongan anggaran dapat berdampak langsung pada akses dan kualitas layanan bagi masyarakat (Yuliandri, 2021: 112).

Selain itu, pendekatan efisiensi anggaran yang hanya berfokus pada pemotongan belanja operasional tanpa memperhatikan peningkatan produktivitas aparatur negara juga dapat menurunkan efektivitas kebijakan publik. Efisiensi yang ideal bukan sekadar menghemat anggaran, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik (Saragih, 2019: 89). Oleh karena itu, perlu ada strategi komprehensif dalam merancang kebijakan efisiensi anggaran agar tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga peningkatan produktivitas sektor publik.

Beberapa negara telah berhasil menerapkan strategi efisiensi anggaran yang tidak hanya berfokus pada pemangkasan belanja, tetapi juga pada reformasi kebijakan yang mendorong peningkatan efektivitas program pemerintah. Misalnya, di negara-negara Skandinavia, penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas dan hasil yang dicapai dari setiap pengeluaran negara (OECD, 2020: 134). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang efektif harus mengedepankan transparansi, pengukuran kinerja, serta perencanaan yang berbasis data dan bukti.

Di Indonesia, regulasi mengenai efisiensi anggaran telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap satuan kerja pemerintah wajib mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan akuntabel (Kemenkeu, 2022: 23). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap sistem digitalisasi serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Strategi efisiensi anggaran yang lebih modern mencakup pendekatan berbasis teknologi, seperti digitalisasi administrasi keuangan dan penguatan sistem *e-budgeting*. Penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara dapat mengurangi risiko pemborosan dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses penganggaran (Dwiyanto, 2020: 56). Digitalisasi ini juga berperan dalam mempercepat penyampaian laporan keuangan serta meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan fiskal.

Lebih lanjut, optimalisasi efisiensi anggaran juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Partisipasi publik dalam proses penganggaran dapat meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara (Sihombing, 2021: 72). Oleh karena itu, strategi efisiensi anggaran harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep efisiensi anggaran di Indonesia dengan fokus pada regulasi, implementasi kebijakan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara penghematan dan optimalisasi kinerja. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi empiris, artikel ini akan membahas berbagai tantangan dan peluang dalam penerapan efisiensi anggaran serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis (Julaidin, J., & Prayitno, R. 2020: 33-38). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif (Robert Cenedy, et All 2024: 543-552).

PEMBAHASAN

1. Implementasi Efisiensi Anggaran di Indonesia

Efisiensi anggaran merupakan salah satu kebijakan yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan penggunaan dana publik yang lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan kebutuhan domestik yang semakin kompleks (Mardiasmo, 2018: 67). Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan anggaran yang lebih ketat dan terarah akan membantu memperkuat ketahanan fiskal serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah **refocusing anggaran**, yakni kebijakan pemindahan alokasi belanja negara dari sektor yang kurang mendesak ke sektor yang lebih prioritas. Kebijakan ini banyak diterapkan selama pandemi COVID-19, di mana anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur dan perjalanan dinas dialihkan ke sektor kesehatan dan perlindungan sosial (Kemenkeu, 2022: 34). Melalui refocusing, pemerintah berupaya memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk menangani krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi secara lebih efektif.

Selain refocusing anggaran, pemerintah juga mengadopsi **digitalisasi administrasi** dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasional yang sering kali membengkak akibat prosedur birokrasi yang panjang dan tidak efisien. Digitalisasi ini mencakup penerapan sistem e-budgeting, e-procurement, dan e-payment yang memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara (Dwiyanto, 2020: 102). Dengan sistem ini, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi potensi kebocoran anggaran akibat praktik korupsi atau mark-up harga.

Selanjutnya, reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam strategi efisiensi anggaran. Pemerintah telah menerapkan **penyederhanaan struktur birokrasi** dengan memangkas jumlah eselon di berbagai instansi serta mempercepat sistem kerja berbasis digital (Saragih, 2019: 45). Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan tidak membebani anggaran negara dengan biaya administrasi yang berlebihan.

Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah membawa sejumlah perubahan positif, implementasi efisiensi anggaran masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah **resistensi birokrasi**, di mana sebagian besar aparat pemerintah masih terbiasa dengan sistem konvensional dan kurang siap dalam beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam digitalisasi administrasi (Sihombing, 2021: 78). Banyak pejabat dan pegawai negeri yang merasa bahwa sistem digitalisasi memperumit pekerjaan mereka, padahal dalam jangka panjang, langkah ini justru dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban kerja administratif.

Selain itu, **kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran** juga menjadi kendala serius dalam penerapan efisiensi anggaran. Masih ditemukan kasus di mana alokasi dana tidak sesuai dengan peruntukannya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Transparansi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi benar-benar diterapkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Yuliandri, 2021: 123). Upaya peningkatan transparansi dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta membuka akses informasi kepada publik agar masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.

Tantangan lain yang muncul dalam implementasi efisiensi anggaran adalah **kesenjangan kapasitas fiskal antara pemerintah pusat dan daerah**. Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan efisiensi, terutama dalam digitalisasi administrasi yang membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai (Basri & Patunru, 2020: 88). Hal ini menunjukkan perlunya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk pendanaan, pelatihan, serta regulasi yang lebih fleksibel untuk membantu daerah dalam mengadopsi strategi efisiensi anggaran.

Di sisi lain, meskipun digitalisasi administrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, proses transisi dari sistem manual ke sistem digital masih menghadapi berbagai kendala teknis dan regulasi. Beberapa instansi pemerintah mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan sistem baru dengan sistem lama yang sudah berjalan bertahun-tahun (Kemenkeu, 2022: 46). Masalah ini menyebabkan keterlambatan dalam implementasi digitalisasi dan meningkatkan risiko duplikasi anggaran akibat ketidaksempurnaan sistem baru yang diterapkan.

Selain tantangan teknis, keberhasilan implementasi efisiensi anggaran juga bergantung pada **kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan**. Banyak pegawai yang masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut terkait penggunaan teknologi digital dalam administrasi keuangan negara (OECD, 2020: 97). Tanpa peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi administrasi tidak akan berjalan efektif, dan efisiensi anggaran yang diharapkan tidak dapat tercapai secara optimal.

Di samping itu, efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan efisiensi anggaran juga dipengaruhi oleh **stabilitas politik dan komitmen pemimpin negara**. Pergantian kepemimpinan sering kali membawa perubahan kebijakan yang dapat menghambat keberlanjutan program efisiensi anggaran yang telah berjalan (Dwiyanto, 2020: 112). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih bersifat jangka panjang agar reformasi yang telah diterapkan tidak terhenti akibat pergantian pemerintahan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan **penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat** dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas kebijakan ini (Sihombing, 2021: 91). Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam mengawasi penggunaan anggaran, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Selain itu, strategi **penguatan regulasi dan penegakan hukum** juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya menjadi jargon politik semata, tetapi benar-benar membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara (Yuliandri, 2021: 135).

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, implementasi efisiensi anggaran di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek. Pemerintah perlu terus mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan serta mencari solusi inovatif agar efisiensi anggaran dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

2. Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, penerapan efisiensi anggaran yang tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kinerja pemerintah. Salah satu dampak utama yang sering terjadi adalah **penurunan kualitas layanan publik**. Pemangkasan anggaran yang dilakukan tanpa perencanaan strategis dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya untuk sektor-sektor penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Mardiasmo, 2018: 87).

Misalnya, dalam sektor kesehatan, pemotongan anggaran dapat mengurangi ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, serta tenaga medis di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada layanan kesehatan publik (Yuliandri, 2021: 141). Demikian pula di sektor pendidikan, pemangkasan anggaran dapat menghambat program peningkatan kualitas tenaga pengajar serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Selain itu, **kesenjangan fiskal antara daerah** menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi efisiensi anggaran. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah cenderung lebih terdampak oleh kebijakan penghematan dibandingkan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi (Basri & Patunru, 2020: 101). Daerah-daerah dengan keterbatasan fiskal sering kali kesulitan dalam menjalankan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kebijakan transfer fiskal yang lebih adil serta memberikan dukungan teknis dan finansial kepada daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas agar kebijakan efisiensi anggaran tidak semakin memperburuk ketimpangan tersebut (Kemenkeu, 2022: 57).

Namun, jika efisiensi anggaran diterapkan dengan strategi yang tepat, dampaknya bisa sangat positif bagi kinerja pemerintah. Salah satu manfaat utama adalah **peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui insentif berbasis kinerja**. Dengan alokasi anggaran yang lebih efisien, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memberikan insentif kepada ASN yang berkinerja baik (Saragih, 2019: 73).

Pendekatan berbasis kinerja ini dapat mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan akuntabel di lingkungan birokrasi. ASN yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan penghargaan, sementara yang berkinerja rendah akan diberikan pelatihan atau tindakan pembinaan yang sesuai. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan publik (Sihombing, 2021: 84).

Selain meningkatkan kinerja ASN, efisiensi anggaran juga dapat mendorong **optimalisasi belanja modal** untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi publik. Dengan memprioritaskan pengeluaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional (Dwiyanto, 2020: 124).

Belanja modal yang dialokasikan secara optimal dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi, misalnya melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta infrastruktur digital. Infrastruktur yang lebih baik akan mempercepat arus barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong investasi dari sektor swasta (OECD, 2020: 112). Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan efisiensi anggaran juga sangat bergantung pada **transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara**. Pengurangan anggaran di berbagai sektor harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan (Mardiasmo, 2018: 95). Penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan negara, seperti e-budgeting dan e-audit, dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi praktik korupsi.

Lebih lanjut, **partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran** menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas. Melalui mekanisme transparansi anggaran dan keterlibatan publik dalam proses perencanaan serta evaluasi kebijakan fiskal, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa program-program efisiensi anggaran berjalan sesuai dengan prinsip good governance (Sihombing, 2021: 92).

Di tingkat internasional, beberapa negara telah berhasil menerapkan strategi efisiensi anggaran yang memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintahan mereka. Negara-negara Skandinavia, misalnya, menggunakan pendekatan **zero-based budgeting**, di mana setiap program harus dievaluasi dari awal setiap tahun untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat yang maksimal (OECD, 2020: 135). Pendekatan ini membantu menghindari pemborosan anggaran serta memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan lebih efektif.

Dalam konteks Indonesia, penerapan efisiensi anggaran yang berbasis kinerja dan transparansi dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan publik. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang telah berjalan, memastikan bahwa penghematan yang dilakukan tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik, serta mencari solusi inovatif untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara (Kemenkeu, 2022: 68).

Dengan demikian, dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja pemerintah sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diterapkan. Jika dilakukan dengan perencanaan yang matang, efisiensi anggaran dapat meningkatkan kinerja aparatur negara, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, tanpa strategi yang tepat, efisiensi anggaran justru dapat menurunkan kualitas pelayanan publik serta memperburuk ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis data dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

3. Strategi Optimalisasi Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai keseimbangan antara penghematan dan optimalisasi kinerja, pemerintah perlu menerapkan strategi yang tidak hanya menekan biaya tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran yang optimal harus berorientasi pada hasil (output) dan dampak (outcome), bukan sekadar pemangkasan belanja. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut mencakup penguatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran (Mardiasmo, 2018: 112).

Salah satu strategi utama adalah **penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran**. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi penggunaan anggaran secara lebih efektif. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi adalah **e-budgeting**, yaitu sistem digital yang memungkinkan setiap tahapan dalam proses penganggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat diakses secara terbuka oleh publik dan pengawas internal (Sihombing, 2021: 76).

Selain e-budgeting, konsep **open government** juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa informasi anggaran dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi anggaran serta memberikan masukan yang konstruktif dalam proses pengambilan kebijakan. Transparansi ini juga dapat mengurangi risiko penyimpangan atau praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara (Yuliandri, 2021: 134).

Strategi berikutnya adalah **peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)** di sektor pemerintahan. Implementasi efisiensi anggaran yang optimal sangat bergantung pada kompetensi aparatur negara dalam menjalankan kebijakan fiskal yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan **pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN** agar mereka lebih adaptif terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen keuangan berbasis kinerja, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi keuangan, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip good governance (Basri & Patunru, 2020: 119).

Selain pelatihan teknis, penguatan kapasitas SDM juga dapat dilakukan melalui pemberian **insentif berbasis kinerja**. Insentif ini bertujuan untuk mendorong ASN agar lebih produktif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Dengan sistem reward and punishment yang jelas, ASN yang berkinerja baik akan mendapatkan apresiasi, sedangkan yang kurang produktif akan diberikan pembinaan lebih lanjut (Dwiyanto, 2020: 145).

Selain transparansi dan peningkatan kapasitas SDM, **pemanfaatan teknologi** menjadi strategi penting dalam optimalisasi efisiensi anggaran. Digitalisasi administrasi pemerintahan memungkinkan berbagai proses keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Salah satu contoh penerapan teknologi dalam efisiensi anggaran adalah penggunaan **sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa**. Melalui sistem **e-procurement**, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional yang timbul dari proses pengadaan yang konvensional dan rawan manipulasi (OECD, 2020: 162).

Penggunaan teknologi juga dapat diterapkan dalam sistem pembayaran negara melalui **e-payment**. Dengan sistem ini, pembayaran anggaran dilakukan secara elektronik dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana serta mempercepat proses pencairan anggaran (Kemenkeu, 2022: 82). Sistem ini juga dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Selain itu, strategi efisiensi juga dapat dilakukan melalui **penyederhanaan regulasi birokrasi**. Struktur birokrasi yang kompleks sering kali menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi agar sistem birokrasi lebih fleksibel dan tidak membebani anggaran negara dengan biaya administrasi yang tidak perlu (Saragih, 2019: 98).

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah **zero-based budgeting**, yaitu metode penganggaran di mana setiap unit kerja harus menyusun anggaran dari nol setiap tahun, bukan sekadar memperpanjang anggaran tahun sebelumnya. Dengan pendekatan ini, setiap pengeluaran dapat dievaluasi secara lebih cermat untuk memastikan bahwa hanya belanja yang benar-benar diperlukan yang akan disetujui (Mardiasmo, 2018: 128).

Dalam konteks daerah, optimalisasi efisiensi anggaran juga memerlukan **peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**. Pemerintah daerah sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran karena keterbatasan fiskal dan kapasitas SDM yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan dan bimbingan teknis agar setiap daerah dapat menerapkan strategi efisiensi anggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka (Sihombing, 2021: 89).

Di tingkat internasional, banyak negara telah berhasil menerapkan strategi efisiensi anggaran yang optimal dengan mengadopsi pendekatan berbasis data dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan negara. Negara-negara Skandinavia, misalnya, telah menerapkan model **performance-based budgeting**, di mana anggaran dialokasikan berdasarkan kinerja dan hasil yang dicapai oleh masing-masing instansi pemerintah (OECD, 2020: 175). Model ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam meningkatkan efektivitas anggaran negara.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan pemerintah dapat mencapai efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Kebijakan efisiensi harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas fiskal dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sangat diperlukan dalam memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar berdampak positif bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Efisiensi anggaran merupakan langkah krusial dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang agar tidak sekadar berorientasi pada pemangkasan anggaran, tetapi juga mampu mengoptimalkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Efisiensi anggaran yang dilakukan secara strategis dapat meningkatkan efektivitas belanja negara, memperkuat stabilitas fiskal, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Faktor utama dalam keberhasilan efisiensi anggaran adalah reformasi birokrasi, digitalisasi sistem keuangan, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Reformasi birokrasi yang mencakup penyederhanaan regulasi dan peningkatan kapasitas ASN akan membantu memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak menghambat kinerja pemerintahan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan anggaran, seperti e-budgeting dan e-procurement, dapat meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Transparansi yang lebih baik melalui prinsip open government juga

menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah.

2. Saran

1. Pemerintah perlu **meningkatkan pengawasan dalam implementasi efisiensi anggaran** agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjadi instrumen penghematan, tetapi juga mampu menjaga kualitas layanan publik. Pengawasan yang lebih ketat dapat dilakukan melalui audit keuangan yang berbasis teknologi serta keterlibatan lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
2. Diperlukan **pengembangan kebijakan berbasis data** dalam pengambilan keputusan anggaran. Penggunaan data yang akurat dan analisis yang mendalam akan membantu pemerintah dalam menentukan sektor-sektor prioritas yang memerlukan alokasi anggaran lebih besar serta mengidentifikasi area yang berpotensi untuk dilakukan efisiensi. Dengan pendekatan ini, kebijakan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
3. **Partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran** perlu terus didorong agar kebijakan efisiensi anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Dengan strategi yang lebih matang dan berorientasi pada hasil, efisiensi anggaran dapat menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, F., & Patunru, A. (2020). *Ekonomi Indonesia di Era Digitalisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Keuangan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Julaiddin, J., & Prayitno, R. (2020). PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33-38. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.144>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022*. Jakarta: Kemenkeu.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- OECD. (2020). *Public Finance and Budgeting: Global Trends in Fiscal Policy*. Paris: OECD Publishing.
- Robert Cenedy, Rifka Zuwanda, Firdaus, & Rangga Prayitno. (2024). UPAYA MENIMBULKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI DALAM MEMBERIKAN KEAMANAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK HILIRAN

GUMANTI KABUPATEN SOLOK. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 543-552. Retrieved from <https://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/1143>

Saragih, J. (2019). *Tata Kelola Keuangan Negara di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Pustaka Setia.

Sihombing, R. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yuliandri, H. (2021). *Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Negara*. Malang: UB Press.